

**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

NASKAH PUBLIKASI



Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun oleh :

Nama : Astrid Thalia Miranda Mashanafi
NIM : 20140610191
Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

NASKAH PUBLIKASI

**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

Disusun oleh :

Nama : Astrid Thalia Miranda Mashanafi

NIM : 20140610191

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 8 Agustus 2018

Menyetujui

Dosen Pembimbing

SEPTI NURWIJAYANTI, S.H., M.H

NIK. 19730918199702153029

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Astrid Thalia Miranda Mashanafi
Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email : astridmiranda888@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang Peran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Terhadap Kesejahteraan masyarakat. Masih banyak masyarakat miskin dan siswa putus sekolah merupakan salah satu masalah kesejahteraan yang dihadapi oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow mempunyai tanggung jawab dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif-Empiris dengan mengambil subjek penelitiannya yaitu Pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kesejahteraan di Kabupaten Bolaang Mongondow ini belum maksimal, dibuktikan dengan masih banyak masyarakat miskin sebesar 19.550 ribu jiwa dan 6.226 siswa putus sekolah pada tahun 2016. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow sudah berperan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan menyediakan proses pelatihan keterampilan, menyediakan alat kelengkapan untuk lahan pertanian, pupuk dan bibit gratis, bantuan tunai dan pangan non tunai, pembangunan rumah untuk rakyat miskin, bantuan kelompok usaha bersama, mengadakan ujian paket C, Paket B, paket A, menyediakan beasiswa, bantuan peralatan sekolah, serta perbaikan infrastruktur sekolah. Tetapi dalam pelaksanaannya masih ada kendala yang dihadapi pemerintah yaitu kurangnya partisipasi masyarakat untuk bekerjasama dengan pemerintah dalam menjalankan program pemerintah sehingga menyebabkan tidak optimal dalam pelaksanaannya. Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow untuk lebih mengoptimalkan program-program kesejahteraan serta dibutuhkan peran dari masyarakat untuk bekerjasama dengan pemerintah sehingga terciptanya masyarakat yang sejahtera.

Kata Kunci : Kabupaten Bolaang Mongondow, Kesejahteraan, Peran Pemerintah.

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Situasi masyarakat di Indonesia masih sangat jauh dari kata sejahtera, masih banyak masyarakat belum memperoleh kesejahteraan yang pantas untuk kehidupannya. Masyarakat dapat dikatakan sejahtera ketika semua kebutuhannya dapat terpenuhi untuk keberlangsungan hidupnya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Kesejahteraan dapat dilihat dari beberapa indikator seperti dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Di bidang ekonomi, masyarakat dianggap sejahtera ketika dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Sedangkan dari bidang pendidikan masyarakat dikatakan sejahtera ketika memperoleh pendidikan yang bermutu, pendidikan yang dapat dijangkau dengan mudah dan murah atau setidaknya menyelesaikan jenjang pendidikan minimal dua belas tahun bersekolah.

Salah satu tujuan pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, begitu pun dengan Kabupaten Bolaang Mongondow. Kabupaten Bolaang Mongondow Kabupaten ini berada di Provinsi Sulawesi Utara, dimana jumlah penduduk di Kabupaten ini pada tahun 2016 berjumlah 236.893 ribu jiwa.¹ Kabupaten ini merupakan salah satu Kabupaten yang menjadi lumbung beras di Sulawesi Utara serta memiliki potensi holtikultura. tetapi, dengan berbagai potensi itu masih

¹Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow, 2017, *Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Angka*, Bolaang Mongondow, CV. Garuda Star, hlm. 40.

terdapat penduduk yang miskin atau yang masih belum sejahtera, dimana Kabupaten ini menempati urutan ke-4 dari 13 Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara yang menyumbang kurang lebih 8.34% atau sebesar 19.550 ribu jiwa penduduk miskin.²

Masih banyaknya penduduk yang hanya bekerja sebagai buruh, petani ataupun pekerjaan lainnya yang penghasilannya tidak mencukupi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari merupakan salah satu faktor memperlambat peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten ini. Salah satu kendalanya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak yaitu status pendidikan yang ditempuh tidak memenuhi standar sehingga mereka tidak ada pilihan lain lagi untuk menjadi buruh ataupun pekerjaan lain dengan upah yang kecil. Ini menyebabkan orang tua tidak bisa membayar biaya sekolah anaknya atau anak-anak lebih memilih berhenti sekolah untuk bekerja membantu perekonomian keluarga sehingga menyebabkan banyaknya siswa putus sekolah.

Dari Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow masih ada sekitar 6.226 siswa yang putus sekolah di usia 7-18 Tahun dimana rata-rata usia tersebut berada di jenjang pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. ³ Dilihat dari kondisi saat ini rata-rata penyerap tenaga kerja mensyaratkan standar paling bawah untuk merekrut pekerja dengan kualifikasi minimum lulusan

² *Ibid*, hlm. 193.

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Angka, *op. cit.*, hlm. 59.

SMA. Maka bisa dipastikan selain bekerja menjadi buruh atau petani, begitu banyak juga pengangguran yang ada di Kabupaten ini.

Maka dapat dikatakan bahwa kesejahteraan untuk memenuhi keberlangsungan hidup seperti memenuhi sandang, pangan, papan, mendapatkan pendidikan yang bermutu, murah atau dapat menyelesaikan pendidikan minimal 12 tahun bersekolah belum bisa dirasakan oleh masyarakat. Ini merupakan salah satu pekerjaan rumah bagi pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow untuk masyarakatnya. Masih banyak masyarakat yang miskin ini bisa berdampak buruk untuk kemajuan dan perkembangan daerah, untuk pemberdayaan masyarakat maupun pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dua metode penelitian yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris, yang pengumpulan bahan hukumnya dengan studi kepustakaan dan wawancara dengan responden. Bahan-bahan hukum yang terkumpul akan diolah dengan metode deskriptif kuantitatif. Tempat pengambilan bahan hukum untuk melengkapi penelitian ini di Perpustakaan UMY dan Kabupaten Bolaang Mongondow.

C. HASIL PENELITIAN

1. Tingkat Kesejahteraan Kabupaten Bolaang Mongondow

Di dalam penelitian ini, peneliti mengambil dua indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan di Kabupaten Bolaang Mongondow, yaitu dalam bidang Ekonomi dan Bidang Pendidikan yaitu sebagai berikut :

a. Tingkat Kesejahteraan dalam Bidang Ekonomi

Kabupaten Bolaang Mongondow mempunyai 15 Kecamatan, dimana di dalam penelitian ini peneliti memilih 5 kecamatan untuk dilakukan wawancara terkait tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow. Dari 5 kecamatan ini, masih ada 4 kecamatan yang belum sejahtera dan ada 1 kecamatan yang bisa dikatakan sebagian besar masyarakatnya sudah sejahtera jika diukur dari pekerjaan.

Menurut Camat Passi Timur Bapak Djemi Julius Moonik, S.H. mengatakan bahwa masyarakat di kecamatan ini sebagian besar sudah sejahtera.⁴ Salah satu penyebab tingginya kesejahteraan masyarakat disini karena Kecamatan ini memiliki luas panen tanaman sayuran paling besar di Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu sebesar 193 hektar pada tahun 2016 dan menghasilkan sebanyak 357 ton tanaman sayuran pada tahun 2016. Tanaman sayuran yang dimaksud disini berupa bawang Merah, Cabai,

⁴ Djemi Moonik, Camat Passi Timur, dalam wawancara penelitian Peran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kantor kecamatan Passi Timur, 2 April 2018. Izin mengutip telah diberikan.

Kentang, Kubis dan Petsai. Selain tanaman sayuran, Kecamatan ini juga mempunyai luas tanaman perkebunan cengkeh kedua terbesar setelah Kecamatan Lolayan yaitu sekitar 1.087,75 Hektar. Tanaman sayuran yang merupakan salah satu kebutuhan sehari-hari ini membuat Kecamatan ini merupakan sektor terbesar atau terbanyak yang menyuplai sayuran di Kabupaten ini.⁵

Sedangkan 4 Kecamatan yang belum sejahtera ini adalah Kecamatan Dumoga Tenggara, Kecamatan Dumoga Barat, Kecamatan Bilalang, dan Kecamatan Lolayan yang berdasarkan hasil wawancara dengan keempat Camat tersebut, dimana empat Kecamatan ini mempunyai penduduk yang mayoritasnya adalah petani dan belum dapat dikatakan sejahtera karena lebih banyak orang yang bekerja di lahan orang lain dibandingkan mereka mempunyai lahan sendiri.

Selain dari pekerjaan, pendapatan dan pengeluaran juga merupakan indikator selanjutnya untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Bapak Tahlis Gallang, S.IP, MM. Mengatakan bahwa Pendapatan domestik regional bruto per kapita atas dasar harga berlaku merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur tingkat kesejahteraan di Kabupaten. Pada saat ini pendapatan di Kabupaten ini masih kecil, maka dapat dikatakan

⁵ Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bolaang Mongondow 2016.

pendapatan masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow ini masih di bawah rata-rata.⁶ Untuk menghitung pendapatan perkapita, diukur dari pendapatan produk domestik regional bruto atas dasar harga sebagaimana yang dikatakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow di atas dan dibagi dengan jumlah penduduk. Jadi, 5.948,2 Miliar dibagi dengan jumlah penduduk sebesar 236.893 ribu jiwa maka dihasilkan sebesar Rp. 2.510.923 rata-rata pendapatan untuk satu tahun yang dimiliki masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow.⁷

Menurut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Bapak Drs. Abdul Haris Bambela mengatakan bahwa Jika mengukur tingkat kesejahteraan, salah satunya diukur dari pengeluaran. Ketika pengeluaran di dalam suatu rumah tangga lebih banyak pengeluaran non makanan dibandingkan makanan berarti rumah tangga tersebut sudah sejahtera. Tetapi data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow, presentase pengeluaran non makanan di Kabupaten ini masih rendah dibandingkan makanan yaitu sebesar 38,97% pada tahun 2016. Jadi dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan di Kabupaten Bolaang

⁶ Tahlis Gallang, Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, dalam wawancara penelitian Peran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kantor Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow, 11 April 2018. Izin mengutip telah diberikan.

⁷ Badan Pusat Statistik, *Pendapatan Regional Perkapita*, Diakses ada tanggal 26 Juli 2018 Pukul 01.57, <https://www.bps.go.id/subject/52/produk-domestik-regional-bruto--lapangan-usaha-.html>

Mongondow masih tergolong rendah.⁸ Presentase pengeluaran untuk non makanan di Kabupaten Bolaang Mongondow mengalami penurunan dari tahun 2015 sebesar 39,18% menjadi 38,97% pada tahun 2016. Sedangkan pengeluaran untuk makanan mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar 60,82% menjadi 61,03% pada tahun 2016. Meningkatnya pengeluaran untuk makanan dan menurunnya pengeluaran untuk non makanan menunjukkan bahwa kesejahteraan Kabupaten ini belum membaik.⁹

Kualitas dan fasilitas rumah tinggal merupakan indikator berikutnya untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. dimana berdasarkan data dari Susenas 2016 di Kabupaten Bolaang Mongondow masih terdapat sekitar 16,38% rumah tangga yang menempati rumah kumuh, sekitar 32,23% rumah tak layak huni yang ditempati oleh rumah tangga, masih terdapat 3,33% rumah tangga yang berlantaikan tanah tinggal di rumah yang beratap layak yaitu sebanyak 96,22% dan berdinding tembok sebesar 59,50%, 61,08% rumah tangga yang memiliki jamban sendiri dan masih terdapat 31,43% yang tidak mempunyai fasilitas pembuangan air besar, terdapat 6,21% rumah tangga yang menggunakan jamban bersama dengan tetangganya dan 1,28% menggunakan MCK tahun 2016 serta 99,86% rumah tangga di

⁸ Abdul Haris Bambela, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow, dalam wawancara penelitian Peran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di kantor Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow, 11 April 2018. Izin mengutip telah diberikan.

⁹ Survei Sosial Ekonomi Nasional 2016.

Kabupaten ini sudah menikmati fasilitas listrik dan masih ada 0,14% rumah tangga yang belum menikmati fasilitas listrik pada tahun 2016.¹⁰

b. Tingkat Kesejahteraan dalam Bidang pendidikan

Hak atas Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional di Indonesia.¹¹ Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi : “Setiap warga negara indonesia berhak mendapatkan pendidikan”. Di era yang semakin modern ini pendidikan sangat diperlukan untuk menunjang pekerjaan yang diminati. Ketika seseorang menyelesaikan pendidikannya pada jenjang pendidikan yang tinggi maka orang tersebut mempunyai ilmu pengetahuan yang luas dan juga keterampilan atau keahlian yang tinggi.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Bapak Renti Mokoginta, S.Pd., MAP., mengatakan bahwa kesejahteraan dalam bidang pendidikan di kabupaten ini belum maksimal. Dimana, di Kabupaten bolaang Mongondow ini masih banyak siswa putus sekolah. Mulai dari tingkat SD, SMP, SMA bahkan ada yang tidak sekolah.¹²

¹⁰ Survei Sosial Ekonomi Nasional 2016.

¹¹ Fahriah, “Kewenangan Pemerintah Daerah Otonom Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, III, (Januari, 2015)., hlm. 1.

¹² Renti Mokoginta, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow dalam wawancara penelitian Peran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, 14 Maret 2018. Izin mengutip telah diberikan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow bisa dilihat pada umur 7-12 tahun yang pada umumnya mengenyam pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 33.977 ribu siswa yang bersekolah, 241 orang yang tidak melanjutkan sekolah atau putus sekolah. Sedangkan pada umur 13-15 tahun yang pada umumnya mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 10.769 ribu siswa yang sekolah dan 1.032 ribu siswa yang tidak sekolah lagi atau putus sekolah. Sedangkan pada umur 16-18 tahun yang pada umumnya mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Atas, ada sebanyak 7.209 ribu siswa yang bersekolah dan sebanyak 4.953 ribu siswa yang tidak sekolah lagi. Maka jika dijumlah masih ada sebanyak 6.226 ribu siswa yang putus sekolah dari SD, SMP dan SMA. Angka ini masih terbilang tinggi dimana masih banyaknya siswa yang putus sekolah.

2. Masalah Kesejahteraan di Kabupaten Bolaang Mongondow

Masalah kesejahteraan di Kabupaten ini dibagi menjadi dua, yaitu masalah kesejahteraan dalam bidang ekonomi dan masalah kesejahteraan dalam bidang pendidikan.

a. Masalah Kesejahteraan dalam Bidang Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Passi Timur dan Camat Lolayan mengatakan bahwa Permasalahan kesejahteraan

di kecamatan ini yaitu masih banyaknya masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan hanya mengharapkan pertanian.

Dari data Survei Angkatan Kerja Nasional Tahun 2015, pekerja bebas pertanian menempati urutan kedua menurut komposisi status pekerjaan penduduk yang bekerja di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2015 yaitu sebanyak 22% dan di urutan pertama ditempati oleh berusaha sendiri sebanyak 26% yang merupakan mayoritas dari keseluruhan pekerjaan. Selain itu, pekerja bebas non pertanian sebanyak 12% dan yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai sebanyak 17%. Sedangkan yang paling rendah yang hanya sebanyak 3% adalah berusaha dibantu buruh tetap/dibayar.¹³

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Dinas Sosial, Bapak Drs. Abdul Haris Bambela, mengatakan bahwa Masalah kesejahteraan di kabupaten ini salah satu yang utama yaitu dari pendapatan yang tidak mencukupi untuk membiaya keperluan sehingga berdampak pada pengeluaran makanan dan non makanan. Selain itu, masih banyaknya penerima Bantuan Pangan non Tunai merupakan salah satu masalah juga. Dimana, dengan masih banyaknya penerima bantuan pangan non tunai berarti

¹³ Survei Angkatan Kerja Nasional 2015.

masih banyaknya masyarakat yang belum sejahtera di Kabupaten ini, yang belum terpenuhi keperluan sehari-harinya.¹⁴

Pengeluaran untuk non makanan seperti sekolah dan kesehatan sangat dipengaruhi oleh pendapatan. Ketika seseorang hanya mendapatkan upah dibawah rata-rata maka mereka hanya mampu untuk menunjang keperluan makanan atau ada pun yang tidak dapat memenuhi keseluruhan keperluan makanan dan mengandalkan bantuan dari pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Camat Dumoga Barat, Bapak Demsi Potabuga, S.E., menyatakan bahwa dengan tidak memiliki pekerjaan yang tetap ataupun penghasilan yang kecil maka masih terdapat pula rumah tangga yang tinggal di rumah yang tidak layak huni yang merupakan permasalahan di kecamatan ini. Mereka yang tidak mempunyai jamban sendiri sehingga masih menggunakan sungai untuk buang air besar dan kecil.¹⁵

Dari hasil wawancara ini bisa dilihat pada data yang ada bahwa pada tahun 2016, di Kabupaten Bolaang Mongondow sudah ada sekitar 61,08% rumah tangga yang memiliki jamban sendiri dan masih terdapat 31,43% yang tidak mempunyai

¹⁴ Abdul Haris Bambela, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow, dalam wawancara penelitian Peran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di kantor Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow, 11 April 2018. Izin mengutip telah diberikan.

¹⁵ Demsi Potabuga, Camat Dumoga Barat, dalam wawancara penelitian Peran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kantor Kecamatan Dumoga Barat, 9 Maret 2018. Izin mengutip telah diberikan.

fasilitas pembuangan air besar, hanya buang sembarang di tanah, sungai ataupun laut. Selain itu, terdapat 6,21% rumah tangga yang menggunakan jamban bersama dengan tetangganya dan 1,28% menggunakan MCK.¹⁶

b. Masalah Kesejahteraan dalam Bidang Pendidikan

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Renti Mokoginta, S.Pd., MAP., mengatakan bahwa Salah satu permasalahan di Kabuapten ini dalam bidang pendidikan adalah masih banyaknya siswa putus sekolah. Penyebab putus sekolah bermacam-macam, dari mereka yang tidak mempunyai biaya atau lebih memilih bekerja dibandingkan sekolah, mereka yang tidak ada niat untuk meneruskan sekolah, ataupun mereka yang jauh dari sekolah dan tidak mempunyai transportasi ataupun biaya transportasi. Selain itu, sarana dan prasara sekolah yang masih kurang juga merupakan permasalahan lainnya. Dimana 20% dari APBD telah di salurkan untuk sektor pendidikan tetapi APBD ini belum juga mencukupi untuk sektor pendidikan di Kabupaten ini. Sehingga, tidak semua infrastuktur dapat di perbaiki atau disediakan dalam satu tahun atau dalam jangka waktu yang cepat untuk menunjang sarana dan prasarana sekolah.¹⁷

¹⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow, *op. cit.*, hlm. 60.

¹⁷ Renti Mokoginta, Kepala Dinas Peendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow dalam wawancara penelitian Peran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Terhadap Kesejahteraan

Berdasarkan hasil wawancara bersama kelima Camat di Kabupaten Bolaang Mongondow, bisa dikatakan bahwa permasalahan yang ada di semua kecamatan ini dalam bidang pendidikan yaitu masih banyaknya siswa yang putus sekolah dengan penyebab tidak tersedianya sekolah yang dapat dijangkau dengan mudah serta ekonomi keluarga yang tidak mampu membiayai sekolah. Ekonomi keluarga yang sangat terbatas dan jarak yang jauh untuk menjangkau sekolah ini menyebabkan siswa yang bersangkutan tidak mampu memenuhi segala kebutuhan untuk bisa bersekolah salah satunya tidak mempunyai transportasi ataupun biaya transportasi untuk sampai ke sekolah, selain juga biaya sekolah.

Dilihat dari data Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondo, dari jumlah sekolah Sekolah Menengah Kejuruan merupakan sekolah terbanyak yang berjumlah 18 sekolah tetapi hanya memiliki 2.287 ribu siswa dan Sekolah Menengah Atas merupakan paling banyak siswanya yaitu sebanyak 2.904 siswa dengan jumlah 14 sekolah dan yang paling sedikit siswanya yaitu sebanyak 601 siswa bersekolah di Madrasah Aliyah dengan jumlah 11 sekolah. Tidak merata sekolah di setiap kecamatan ini

sangat berpengaruh untuk tingkat kesejahteraan kabupaten Bolaang Mongondow dalam bidang pendidikan.¹⁸

c. Penyelesaian Masalah Kesejahteraan Kabupaten Bolaang Mongondow

1. Penyelesaian Masalah dalam Bidang Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, Bapak Tahlis Gallang, S.Ip., MM., mengatakan bahwa upaya dari Pemerintah Daerah untuk penyelesaian Masalah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten ini antara lain :

- a) Menyediakan proses pelatihan keterampilan di Dinas Tranmigrasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Bolaang Mongondow setiap tahunnya, mulai dari menjahit, kursus komputer, perbengkelan dan sebagainya. Dengan harapan setelah mempunyai keterampilan atau keahlian sendiri mereka bisa menjadi wiraswasta, tidak hanya berharap pada satu mata pencaharian.
- b) Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa alat kelengkapan dalam lahan pertanian, serta pupuk dan bibit dari Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow.¹⁹

¹⁸ Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow 2016.

¹⁹ Tahlis Gallang, Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, dalam wawancara penelitian Peran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kantor Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow, 11 April 2018. Izin mengutip telah diberikan.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial, Bapak Drs. Haris Bambela menjelaskan beberapa program di Dinas Sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, yaitu:

- a) Memberikan bantuan tunai untuk keluarga yang tergolong ke dalam rumah tangga sangat miskin dalam program pra keluarga harapan per bulannya. Pra keluarga sejahtera ini ditujukan untuk ibu-ibu dikarenakan tingkat pendapatan suami tidak mencukupi kebutuhan keluarga.
- b) Bantuan berupa pembangunan rumah untuk rakyat miskin dalam program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Sehingga masyarakat yang tergolong dalam masyarakat miskin ini tidak perlu memikirkan lagi uang untuk membangun rumah dan lebih memfokuskan ke usaha yang lebih produktif, dimana uang yang mereka miliki bisa dijadikan modal.
- c) Program Bantuan Pangan Non Tunia (BPNT) kepada keluarga penerima manfaat setiap bulannya yang berupa rastra atau beras sejahtera.
- d) Bantuan sosial kelompok usaha bersama yang ditujukan untuk kepala keluarga yang miskin. Bantuan ini berupa mengembangkan kegiatan usaha ekonomi secara berkelompok. Bantuan ini berupa barang-barang yang diperlukan untuk mengembangkan usaha tersebut. Jadi bantuan disini tidak

berbentuk uang atau tunai. Dengan begitu bantuan ini dapat meningkatkan pendapatan per kepala keluarga dan membuka lapangan kerja yang baru untuk mereka yang tidak mempunyai pekerjaan.

2. Penyelesaian Masalah Dalam Bidang Pendidikan

Menurut Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Renti Mokoginta, S.Pd., MAP., mengatakan bahwa Dinas Pendidikan sudah berupaya menyelesaikan masalah kesejahteraan dalam bidang pendidikan yang berupa :

- a) Dinas Pendidikan membuat program Ujian Paket untuk siswa yang putus sekolah, yang berupa ujian paket C, ujian paket B, serta ujian paket A. Program ini diadakan untuk penanggulangan banyaknya siswa yang putus sekolah.
- b) Menyediakan beasiswa untuk mereka dari keluarga yang tidak mampu dengan memegang kartu Indonesia Pintar.
- c) Memberikan bantuan Peralatan sekolah gratis, seperti seragam yang lengkap, alat tulis dan sepatu serta alat kelengkapan sekolah lainnya bagi mereka keluarga yang tidak mampu.
- d) Dalam penyediaan sarana dan prasarana serta perbaikan infrastuktur, Dinas Pendidikan memilih sekolah yang paling darurat atau yang paling membutuhkan sehingga sekolah tersebutlah yang akan menerima bantuan atau perbaikan sarana dan prasarana. Jadi kerusakan yang berat atau sarana yang

sangat dibutuhkan itulah yang menjadi prioritas Dinas Pendidikan.²⁰

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Terhadap Kesejahteraan Masyarakat, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow sudah berperan dengan menyediakan program-program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya seperti pelatihan keterampilan, menyediakan alat kelengkapan untuk lahan pertanian, bibit serta pupuk gratis, bantuan tunai dalam program pra keluarga harapan, bantuan pangan non Tunai, pembangunan rumah dalam program rumah tidak layak huni, serta bantuan kelompok usaha bersama untuk kepala keluarga miskin. Sedangkan untuk bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow menyediakan program-program berupa mengadakan ujian Paket C, Paket B, dan Paket A, beasiswa untuk pemegang Kartu Indonesia Pintar, bantuan peralatan sekolah gratis serta perbaikan infrastruktur sekolah. Akan tetapi peran pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya karena masih terdapat banyaknya masyarakat miskin di Kabupaten ini, serta masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya yaitu masih kurangnya

²⁰ Renti Mokoginta, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow dalam wawancara penelitian Peran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, 14 Maret 2018. Izin mengutip telah diberikan.

partisipasi masyarakat untuk bekerjasama bersama pemerintah dalam menjalankan program-program pemerintah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi Fahrudin, 2014, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- A.M Fatwa, 2009, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Kompas.
- Amrah Muslimin, 1980, *Beberapa Asas-asas dan Pengertian-pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, Bandung, Alumni.
- Amrah Muslimin, 1986, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Bandung, Alumni.
- Ateng Syafrudin, 1982, *Memantapkan Pemerintahan yang Bersih, Kuat dan Berwibawa*, Bandung, Tarsito.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, 2017, *Gambaran Umum Kondisi Daerah*, Kabupaten Bolaang Mongondow, Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow, 2017, *Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Angka*, kabupaten Bolaang Mongondow, CV. Garuda Star.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow, 2016, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow*, Kabupaten Bolaang Mongondow, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow.
- C.S.T. Kansil, 1981, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Aksara Baru.
- Danang Solihin dan Putut Mahyadi, 2002, *Panduan Lengkap Otonomi Daerah*, Jakarta, ISMEE.
- H. Utang Rosidin, 2015, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Bandung, CV. Pustaka Setia.
- HAW. Widjaja, 2014, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Jazim Hamidi, 2011, *Optik Peraturan Daerah Bermasalah*, Jakarta, Prestasi Pustaka.

- Joeniarto, 1992, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Jakarta, Bina Aksara.
- Maria Farida Indrati S, 2016, *Ilmu Perundang-Undangan*, Depok, PT. Kanisius.
- Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Pipin Syarifudin dan Dedah Jubaedah, 2006, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Bandung, CV. Pustaka Setia.
- Ryaas M. Rasyid, 2000, *Makna Pemerintahan*, Jakarta, Mutiara Sumber Widya.
- Sarundajang, 2012, *Birokrasi dalam Otonomi Daerah : upaya mengatasi kegagalan*, Jakarta Selatan, Kata Penerbit.
- Sirajudin dan Winardi, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara*, Malang, Setara Press.
- Titik Triwulan, 2010, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka.
- Tjahya Supriatna, 1996, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Jakarta, Bumi Aksara.

Jurnal

- Ayu Desiana, "Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah Menuju Good Governance", *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, Volume I No. 1, Juni 2014.
- Eko Sugiharto, "Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Baru Ilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik", *Jurnal Sosial Ekonomi Perikanan Ummul Samarinda*, Volume IV, Februari 2007.
- Erwan Agus Purwanto, "Pembagian Kewenangan Dalam Pelayanan Publik Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah", *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Volume X No. 2, November 2006.
- Fahriah, "Kewenangan Pemerintah Daerah Otonom Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Volume III No. 1, Januari 2015.
- Fatkhul Muin, "Otonomi Daerah dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah", *Fiat Justisia Jurnal*

Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang,
Volume VIII No. 1, Januari-Maret 2014.

Michael Barama, “Pelaksanaan Pemerintah Daerah dan Penerapan Sanksi administrasi Dalam Peraturan Daerah”, *Jurnal Hukum Unsrat*, Volume XXII No. 5, Januari 2016.

Rosni, “Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara”, *Jurnal Geografi*, Volume IX No.1, Januari 2017.

Ryan Ezkiriato, “Analisis Ketrkaitan Antara Indeks Pembangunan Manusia dan PDRB Per Kapita di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, Volume II No. 1, Juli 2013.

Siske Yanti Maratade, “Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara”, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume XVI No. 1, Januari 2016.

Yohanes Suhardin, “Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume XXV No. 3, Juli 2007.

Perundang-Undangan

R.I., Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

R.I., Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang “Pemerintah Daerah”.

R.I., Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang “Sistem Pendidikan Nasional”.

R.I., Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang “Kesejahteraan Sosial”.

Internet

Wikipedia, *Otonomi Daerah*, diakses pada 12 Desember 2017, Pukul 14.25,
https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah#cite_note-1.

Wikipedia, Kemiskinan, diakses pada 29 Juni 2018, Pukul 20.09,
<https://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan> .

Wikipedia, Pertumbuhan Ekonomi, Diakses pada 29 Juni 2018, Pukul 19.26,
https://id.wikipedia.org/wiki/Pertumbuhan_ekonomi.